

STUDIA ADMINISTRASI

Peran Dinas Kesehatan dalam Pemberian Izin Pangan Industri Rumah Tangga pada UMKM di Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka

Wahyu Hidayat¹, Fenyta², Ummi Zakiyah³

¹Dosen Administrasi Negara Institut Pahlawan 12

²Mahasiswa Administrasi Negara Institut Pahlawan 12

³Dosen Administrasi Negara Institut Pahlawan 12

Koresponding Email: wahyujulio99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Kesehatan Dalam Pemberian Izin Pangan Industri Rumah Tangga pada UMKM di Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan penarikan kesimpulan berdasarkan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Kesehatan dalam pemberian izin pangan industri rumah tangga pada Kelurahan Srimenanti sebagai regulator mengacu pada dasar hukum pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, peran pemerintah sebagai fasilitator memberikan wadah kepada UMKM dalam menjalankan kegiatan penyuluhan terkait pemberian izin PIRT, peran pemerintah sebagai dinamisor dalam menerapkan kaderisasi melalui pemberian bimbingan dan pengarahan. Dapat disimpulkan bahwa peran yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan sudah dijalankan dengan baik sesuai ketentuan dan tepat sasaran, walaupun dalam pelaksanaannya belum maksimal dalam mensosialisasikannya pada kelurahan Srimenanti. Rekomendasi kepada pihak Dinas Kesehatan untuk terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat pelaku UMKM terkait perizinan PIRT dan meningkatkan sumber daya manusia terkait kaderisasi.

Kata Kunci: Peran, UMKM, dan Izin PIRT

ABSTRACT

Licensing is a form of legality for both products and businesses themselves to ensure food safety and the ability to market the products safely and widely. This study aims to determine the role of the Health Department in granting Home Industry Food Permit for MSMEs in Srimenanti Village, Sungailiat Subdistrict, Bangka Regency. The research method used is qualitative research with a descriptive design. The data used are primary and secondary data. Data analysis techniques involve drawing conclusions based on observation, interviews, and document analysis. The research results show that the role of the Health Department in granting home industry food permits in Srimenanti Village, as a regulator, refers to the legal basis for granting the Household Food Industry Production Certificate (PIRT). The government's role as a facilitator provides a platform for MSMEs to conduct educational activities related to PIRT permits. The government also acts as a dynamizer by implementing capacity building through guidance and direction. It can be concluded that the role played by the Health Department has been carried out well in accordance with the

STUDIA ADMINISTRASI

provisions and objectives, although its implementation has not been fully optimized in terms of socializing it to Srimenanti Village. Recommendations for the Health Department include improving public awareness and education for MSMEs regarding PIRT permits, as well as enhancing human resources related to capacity building.

Keywords: Role, MSMEs, and PIRT License.

PENDAHULUAN

Menjalankan suatu kegiatan usaha sebagai syarat utama yang dipergunakan dalam perizinan untuk membina, mengarahkan, mengawasi hingga menerbitkan izin-izin usaha perdagangan tentunya harus melalui proses yang baik. Pada pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan, pelaku usaha diharapkan memiliki izin pangan produk yang sudah diproduksinya. Perhatian yang cukup besar memberikan dampak positif terhadap eksistensi dan perkembangan UMKM yang diberikan oleh pemerintah.

Kehadiran UMKM layaknya tombak pada pertumbuhan kreatifitas yang menuju pada pergerakan usaha yang dibutuhkan oleh pasar secara global. Komposisi UMKM di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan usaha besar yang ada di Indonesia (Purwanto, 2020). Pada Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi “dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk perdagangan dalam kemasan ecer, Pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar.” Bahwa dalam hal ini pelaku usaha yang telah menghasilkan produk harus dapat mempertahankan eksistensi dalam mengembangkan produknya pada persaingan skala masyarakat yang luas dengan mengantongi perizinan. Perizinan merupakan bentuk legalitas pada produk sekaligus pelaku usaha itu sendiri. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha skala kecil yang pendiriannya atas inisiatif sendiri, serta didasarkan atas kreatifitas (Kusmanto, 2019).

Dinas Kesehatan salah satu lembaga yang membantu menerbitkan Sertifikat Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dibawah naungan Bupati atau Walikota. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Bisnis rumahan (usaha rumahan) sebelum memasarkan produk yang dijual ke masyarakat, sangatlah diperlukan Perizinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) terutama untuk produk jenis makanan/minuman.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, terdapat permasalahan permasalahan terkait Pemberian Izin Pangan Industri Rumah Tangga pada UMKM di Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, seperti : pelaku usaha UMKM yakni kurangnya potensi dalam melegalkan atau mendaftarkan produk yang dihasilkannya pada Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Kurangnya potensi ini disebabkan UMKM Kelurahan Srimenanti sedikit yang memiliki perizinan PIRT, ternyata mayoritas UMKM mengusahakan industri produk JAESO (Jamu, Es, Bakso) dan hanya beberapa makanan olahan saja yang sudah memiliki izin PIRT.

Hal demikian akan menyebabkan kurang maksimalnya proses pemberian izin PIRT yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan partisipasi pelaku usaha UMKM terhadap legalitas dalam mendaftarkan produk. Sedangkan dalam prinsip legalitas menurut Peraturan Menteri No.:41/M-ind/per/6/2008, bahwa Setiap orang atau badan yang mendirikan usaha dengan kategori menengah wajib.

STUDIA ADMINISTRASI

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, termasuk di Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan adalah industri rumah tangga yang bergerak dalam pengolahan pangan. Namun, tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam sektor ini adalah pemenuhan persyaratan legalitas usaha, terutama terkait dengan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

PIRT tidak hanya menjadi jaminan keamanan pangan bagi konsumen, tetapi juga merupakan syarat penting bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar mereka, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dinas Kesehatan, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pemberian izin ini, memiliki peran strategis dalam mendukung dan memfasilitasi UMKM untuk memenuhi standar keamanan pangan. Namun, dalam praktiknya, proses perizinan sering kali menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang prosedur perizinan, minimnya sosialisasi dari pihak terkait, serta kendala administratif lainnya.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengidentifikasi sejauh mana peran Dinas Kesehatan dalam memberikan izin PIRT kepada UMKM di Kelurahan Srimenanti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang efektivitas peran Dinas Kesehatan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu administrasi publik, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam meningkatkan daya saing UMKM lokal di Kabupaten Bangka.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin menggali lebih dalam bagaimana peran pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kesehatan dalam memberikan izin PIRT kepada UMKM di Kelurahan Srimennati.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat objektif, dan pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Adapun lokasi penelitian yang dipilih peneliti yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang mana perolehan datanya didapat dari hasil pengamatan secara langsung ke beberapa informan yang diwawancarai lalu dilakukan analisa pada perolehan datanya kemudian ditarik kesimpulan dari hasil pengamatan tersebut. Adapun tujuannya yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan : (1) Reduksi Data (data reduction), (2) Penyajian data (data display), (3) Menarik kesimpulan (verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis dan mengkaji tentang Peran Dinas Kesehatan dalam Pemberian Izin Pangan Industri Rumah Tangga pada UMKM di Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Tahun 2023, maka diperlukan analisis secara mendalam yang mencakup beberapa indikator menurut Yusuf (2014:05) yaitu :

- 1) Regulator

STUDIA ADMINISTRASI

Berdasarkan temuan penelitian, peran pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, sebagai regulator telah berjalan dengan baik, terutama melalui penerapan regulasi yang mendasari penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Penggunaan dasar hukum yang merujuk pada enam aturan, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan BPOM, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kerangka regulasi yang kuat. Selain itu, pemanfaatan aplikasi SMART IN-PIRT sebagai alat pengawasan dan pelaksanaan prosedur sertifikasi menjadi langkah inovatif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses perizinan. Namun demikian, implementasi regulasi ini belum sepenuhnya optimal di tingkat pelaku UMKM. Beberapa UMKM masih menghadapi kendala dalam memahami dan menerapkan regulasi yang berlaku, yang mengakibatkan keterlambatan dalam mendapatkan informasi terkait regulasi. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya intensif dari Dinas Kesehatan, seperti sosialisasi yang lebih masif dan pendampingan yang berkelanjutan, guna memastikan seluruh UMKM dapat memanfaatkan regulasi dengan baik untuk mendukung keberlanjutan usaha mereka. Temuan penelitian ini relevan jika dikaitkan dengan teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, (1990), teori ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks penelitian ini, peran Dinas Kesehatan sebagai regulator telah memenuhi aspek struktur birokrasi, terlihat dari penggunaan aplikasi SMART IN-PIRT serta penerapan regulasi berdasarkan enam aturan hukum yang menjadi dasar penerbitan SPP-IRT. Namun, hambatan yang dialami UMKM, seperti keterlambatan dalam memperoleh informasi regulasi, mengindikasikan adanya celah dalam aspek komunikasi, terutama terkait penyampaian informasi dan sosialisasi kebijakan. Dengan demikian, meskipun regulasi telah dirancang dengan baik, efektivitasnya di tingkat implementasi bergantung pada komunikasi yang lebih masif dan pendampingan yang intensif kepada UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa faktor komunikasi dalam teori Edward III menjadi kunci penting untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan terkait perizinan PIRT di Kelurahan Srimenanti.

2) Fasilitator

Berdasarkan temuan penelitian, peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pemenuhan kualitas pembinaan bagi pemohon Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan penyuluhan. Penyuluhan ini mencakup Keamanan Pangan, Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, serta Standar Label dan Iklan Pangan, yang semuanya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah untuk membangun kapasitas pelaku UMKM dalam memenuhi standar keamanan dan legalitas pangan. Namun, pelaksanaan pembinaan ini belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam hal intensitas pemberian informasi. Keterbatasan komunikasi yang intensif menyebabkan UMKM harus secara mandiri melakukan upaya lanjutan (follow-up) untuk memperoleh penyuluhan dan menyelesaikan proses sertifikasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pendampingan yang lebih proaktif dari pemerintah agar UMKM tidak hanya mendapatkan pembinaan berkala, tetapi juga akses yang lebih mudah dan terencana dalam memenuhi persyaratan sertifikasi PIRT.

STUDIA ADMINISTRASI

Temuan ini dapat dikaitkan dengan Teori Pelayanan Publik oleh Dwight Waldo, (2006) yang menekankan pentingnya pemerintah sebagai fasilitator untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pendekatan yang responsif dan berorientasi pada pelayanan. Dalam masalah penelitian ini, peran pemerintah sebagai fasilitator telah diwujudkan melalui penyuluhan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, seperti Penyuluhan Keamanan Pangan dan Standar Label serta Iklan Pangan. Namun, kurangnya intensitas pemberian informasi menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan UMKM, khususnya dalam mempermudah akses dan memastikan pendampingan yang berkelanjutan. Hal ini mencerminkan bahwa aspek keberlanjutan dan aksesibilitas pelayanan, sebagaimana ditekankan dalam teori Waldo, perlu ditingkatkan. Dengan pendekatan yang lebih aktif dan responsif, pemerintah dapat menciptakan layanan yang tidak hanya memenuhi standar regulasi tetapi juga memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menjalankan proses sertifikasi PIRT

3) Dinamisator

Berdasarkan temuan penelitian, peran pemerintah sebagai dinamisator telah diwujudkan melalui pengadaan kader yang bertugas membantu UMKM dalam memenuhi prosedur sertifikasi SPP-IRT. Para kader ini difokuskan untuk wilayah kerja tingkat desa di Kabupaten Bangka, dengan alasan cakupan wilayah desa yang lebih luas serta tantangan aksesibilitas yang cukup jauh. Namun, kebijakan ini belum maksimal diimplementasikan pada tingkat kelurahan, termasuk di Kelurahan Srimenanti, yang tidak memiliki kader pembinaan khusus. Minimnya informasi digital yang diterima oleh UMKM di wilayah ini memperburuk situasi, karena pelaku usaha harus berupaya mandiri dalam mengakses informasi dan pembinaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan peran dinamisator, yang seharusnya tidak hanya berfokus pada wilayah desa tetapi juga mengakomodasi kebutuhan di tingkat kelurahan. Dinas Kesehatan perlu mempertimbangkan strategi yang lebih inklusif, seperti pemanfaatan teknologi informasi atau penugasan kader sementara, agar pembinaan dapat merata di seluruh wilayah, termasuk di Kelurahan Srimenanti.

Temuan ini dapat dikaitkan dengan Teori Administrasi Pelayanan Publik Lokal oleh G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, (1983), yang menekankan pentingnya desentralisasi dan keberpihakan pelayanan kepada kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, Dinas Kesehatan sebagai dinamisator telah mencoba memenuhi perannya dengan mengkaderkan petugas di wilayah desa untuk membantu pelaku UMKM dalam proses sertifikasi SPP-IRT. Namun, fokus yang hanya pada wilayah desa tanpa mencakup kelurahan seperti Srimenanti menunjukkan adanya kelemahan dalam pendekatan desentralisasi yang kurang memperhatikan variasi kebutuhan di tingkat wilayah administratif yang lebih kecil.

Menurut teori ini, keberhasilan desentralisasi pelayanan publik bergantung pada kemampuan pemerintah lokal untuk menjangkau seluruh komunitas secara adil dan merata. Ketimpangan pelayanan yang terjadi di Kelurahan Srimenanti mencerminkan perlunya adaptasi kebijakan dengan memperhatikan karakteristik wilayah kelurahan, seperti populasi yang lebih kecil tetapi tetap membutuhkan akses yang setara. Oleh karena itu, strategi yang lebih fleksibel, seperti pengalokasian sumber daya berbasis

STUDIA ADMINISTRASI

kebutuhan lokal atau pemanfaatan teknologi digital, sangat penting untuk memastikan efektivitas peran dinamisator dalam memberikan pelayanan yang inklusif

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah, melalui Dinas Kesehatan, sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator dalam proses sertifikasi SPP-IRT telah berjalan dengan berbagai upaya, seperti penerapan regulasi, penyuluhan, dan pengadaan kader di wilayah desa. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya intensitas pemberian informasi, keterbatasan pembinaan secara langsung, dan ketimpangan dalam penyebaran kader antara wilayah desa dan kelurahan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan komunikasi, pendampingan yang lebih intensif, serta strategi pelayanan yang lebih inklusif untuk menjangkau UMKM di semua tingkat wilayah administratif. Dengan memperbaiki aspek-aspek ini, pemerintah dapat memastikan peran dan kebijakan yang diimplementasikan dapat memberikan manfaat yang lebih merata dan efektif bagi UMKM, khususnya di wilayah Kelurahan Srimenanti.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka rekomendasi yang dapat disampaikan penulis sesuai dengan Peran Dinas Kesehatan Dalam Pemberian Izin Pangan Industri Rumah Tangga Pada UMKM di Kelurahan Srimenanti, sebagai berikut:

1. Direkomendasikan kepada pihak dinas terkait agar menyosialisasikan secara rutin baik secara digital maupun penyuluhan langsung guna memberi arahan serta bimbingan pada prosedur Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
2. Direkomendasikan kepada pihak Dinas Kesehatan untuk menambahkan sumber daya manusia agar dapat menjangkau seluruh wilayah. Bukan kepada UMKM di desa tetapi pada kelurahan, baik secara digital maupun tidak.
3. Direkomendasikan kepada UMKM agar dapat terus update dalam menerapkan regulasi sehingga UMKM tidak terlambat mendapatkan informasi terkait regulasi dan prosedur SPP-IRT guna menunjang keamanan pangan maupun pemasaran secara global dalam pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwards III, George C., (1990). *Implementing Public Policy*, Congressional Quartely, Inc. Washington D.C
- Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. Y. (2019). Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha. *Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat*, Unri Conference Series and Community Engagement, Medan.
- Cheema, S. Shabbir dan Rondinelli, Dennis A. (1983) *Implementing. Decentralization Programes in Asia : Local Capacity for Rular. Development*. Nagoya ; UNCRD

STUDIA ADMINISTRASI

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). (2018). Jakarta: Direktorat PMPU BPOM.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri. (2008). Jakarta: Direktorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Purwanto, N. P. (2020). Bantuan fiskal untuk UMKM pada masa pandemi Covid-19. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 12(17), 17.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (2012). Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

Dwight Waldo, (2006) “*Pengantar Studi Administrasi*” Diterjemahkan oleh Slamet W. Admosoedarmo, Aksara Baru, jakarta

Yusuf, I. (2014). *Peran dan fungsi pemerintahan dalam proses pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Humaniora